



MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

OLEH : PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI



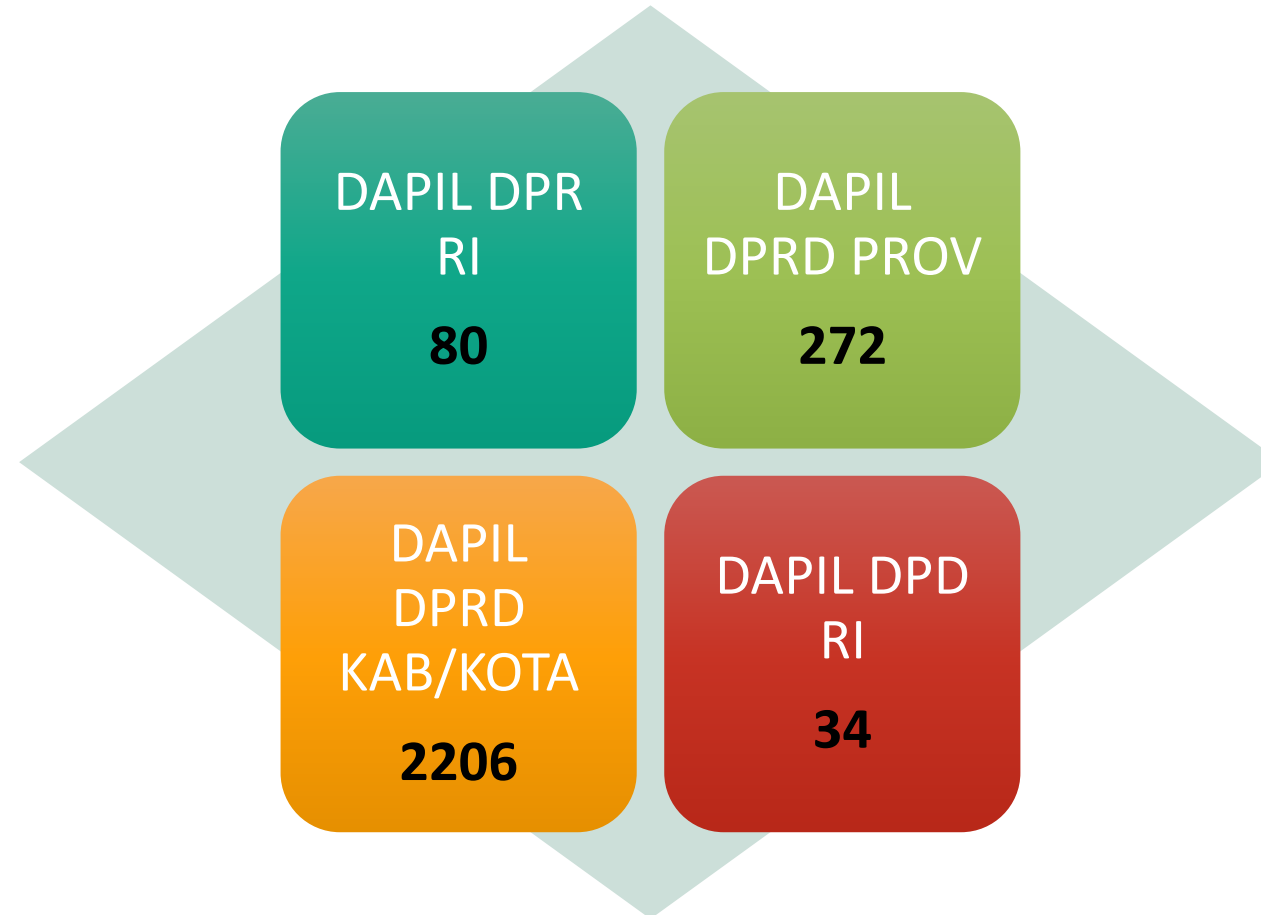
Disampaikan Dalam
Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Pengurus Partai Demokrat
Cisarua – 22 Maret 2019
www.mahkamahkonstitusi.go.id

PEDOMAN DAN DASAR HUKUM

1. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
4. PMK Nomor 3/2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD
5. PMK Nomor 4/2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
6. PMK Nomor 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
7. PMK Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan WaPres
8. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019



LOCUS PERKARA PHPU TAHUN 2019



REKAPITULASI JUMLAH CALON ANGGOTA DPR PEMILU 2019

No Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	DCT Awal	Calon TMS	DCT Perubahan
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	575		575
2	PARTAI GERINDRA	575		575
3	PDI PERJUANGAN	573		573
4	PARTAI GOLKAR	574		574
5	Partai NasDem	575		575
6	PARTAI GARUDA	226		226
7	PARTAI BERKARYA	554	2	552
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	533	2	531
9	PARTAI PERINDO	568	1	567
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	554		554
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	574		574
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	575	1	574
13	PARTAI HANURA	427		427
14	PARTAI DEMOKRAT	573	1	572
19	PARTAI BULAN BINTANG	485		485
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	137		137
Grand Total		8078	5	8071



DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

34 DAERAH PEMILIHAN

KODE	NAMA DAPIL	CALON	L	P
1100	ACEH	26	25	1
1200	SUMATERA UTARA	19	17	2
1300	SUMATERA BARAT	22	20	2
1400	RIAU	27	24	3
1500	JAMBI	20	16	4
1600	SUMATERA SELATAN	33	19	14
1700	BENGKULU	11	8	3
1800	LAMPUNG	25	20	5
1900	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	15	13	2
2100	KEPULAUAN RIAU	12	12	0
3100	DKI JAKARTA	26	19	7
3200	JAWA BARAT	50	45	5
3300	JAWA TENGAH	20	17	3
3400	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11	10	1
3500	JAWA TIMUR	28	25	3
3600	BANTEN	26	22	4
5100	BALI	22	19	3
5200	NUSA TENGGARA BARAT	27	22	5
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	36	30	6
6100	KALIMANTAN BARAT	20	15	5
6200	KALIMANTAN TENGAH	21	14	7
6300	KALIMANTAN SELATAN	14	12	2
6400	KALIMANTAN TIMUR	27	22	5
6500	KALIMANTAN UTARA	23	21	2
7100	SULAWESI UTARA	23	15	8
7200	SULAWESI TENGAH	21	21	0
7300	SULAWESI SELATAN	22	19	3
7400	SULAWESI TENGGARA	49	42	7
7500	GORONTALO	29	19	10
7600	SULAWESI BARAT	30	27	3
8100	MALUKU	29	25	4
8200	MALUKU UTARA	24	21	3
9100	PAPUA	14	11	3
9200	PAPUA BARAT	10	9	1
34 DAERAH PEMILIHAN		812	676	136



JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD PROV KAB KOTA - PENGISIAN SURAT SUARA 2019

NO	NAMA PARTAI	CALON SS	TMS SS	DCT	%
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17.094	22	17.072	7,24%
2	PARTAI GERINDRA	18.756	18	18.738	7,95%
3	PDI PERJUANGAN	18.573	16	18.557	7,87%
4	PARTAI GOLKAR	19.074	24	19.050	8,08%
5	Partai NasDem	18.822	38	18.784	7,97%
6	PARTAI GARUDA	5.286	9	5.277	2,24%
7	PARTAI BERKARYA	11.978	14	11.964	5,07%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	16.627	14	16.613	7,04%
9	PARTAI PERINDO	15.360	27	15.333	6,50%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.374	19	15.355	6,51%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	8.589	10	8.579	3,64%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.336	22	17.314	7,34%
13	PARTAI HANURA	15.423	22	15.401	6,53%
14	PARTAI DEMOKRAT	18.635	20	18.615	7,89%
15	PARTAI ACEH	812	-	812	0,34%
16	PARTAI SIRA	356	-	356	0,15%
17	PARTAI DAERAH ACEH	476	-	476	0,20%
18	PARTAI NANGGROE ACEH	770	4	766	0,32%
19	PARTAI BULAN BINTANG	10.403	5	10.398	4,41%
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	6.084	9	6.075	2,58%
		235.828	293	235.535	100,00%



PERKARA PHPU PRESIDEN–WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

PILPRES:

- Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

PILEG:

- Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Perkara Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

a. Pengajuan Permohonan Pemohon;

b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (untuk PILEG)

c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (untuk PILEG)

d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;

e. Penyampaian Salinan Permohonan dan dan Pemberitahuan Sidang kpd Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

f. Pemeriksaan Pendahuluan;



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

g. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;

h. Pemeriksaan Persidangan;

i. Rapat Permusyawaratan Hakim;

j. Sidang Pengucapan Putusan; dan

k. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).



A. TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pengajuan Permohonan Pemohon

- 8 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg) -- berdasarkan pd waktu/jam penetapan dari KPU
- 23 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pilpres)

b. Penyampaian APPP kepada Pemohon*

- 8 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg)

Permohonan Pemohon dan APPP tersebut dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi

* Untuk PHPU Pilpres tidak ada tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan



B. TAHAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019 (Pileg)

b. Penyampaian APBL kepada Pemohon

8 Mei 2019 s.d. 28 Mei
2019 (Pileg)



C. TAHAPAN PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon

9 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 (Pileg)

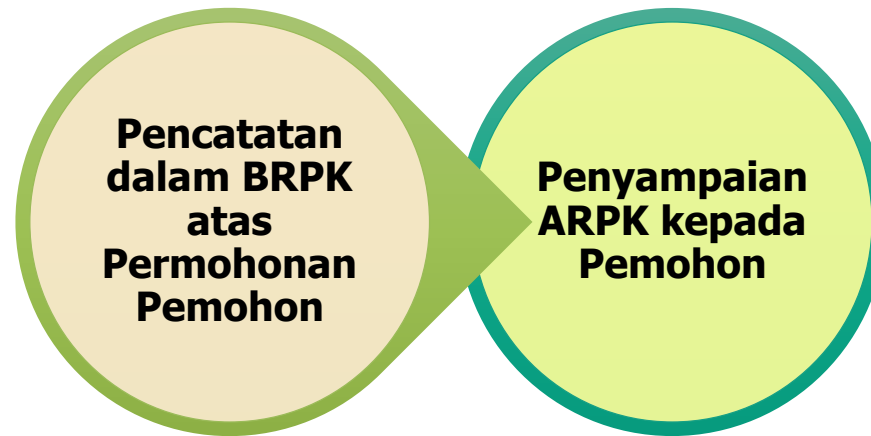
b. Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon

9 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 (Pileg)

c. Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK



D. TAHAPAN PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRPK



BRPK dan ARPK Pilpres → 11 Juni 2019

BRPK dan ARPK Pileg → 1 Juli 2019



E. TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN PEMOHON KEPADA TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT SERTA PEMBERITAHUAN SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.

11 Juni 2019 (Pilpres)
1 Juli 2019 s.d. 2 Juli 2019 (Pileg)

Penyerahan Jawaban Termohon dan Ket. Pihak Terkait; serta

Penyampaian Jawaban Termohon & Ket. Pihak Terkait kepada Pemohon.

12 Juni 2019 (Pilpres)
5 Juli 2019 s.d. 12 Juli 2019 (Pileg)



F. TAHAPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon;

b. Mengklarifikasi Permohonan Pemohon;

c. Pengesahan alat bukti Pemohon

14 Juni 2019 (Pilpres) – selama 1 hari kerja

9 Juli 2019 s.d. 12 Juli 2019 (Pileg) – selama 4 hari kerja



G. TAHAPAN PENYERAHAN PERBAIKAN JAWABAN DAN KETERANGAN

a. Penyerahan perbaikan Jawaban Termohon;

b. Penyerahan perbaikan Keterangan Pihak Terkait;

c. Penyerahan perbaikan Keterangan Bawaslu.

- **13 Juni 2019 (Pilpres)**
- **11 Juli s.d. 26 Juli 2019 (Pileg)**



H. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

**Mendengar
Jawaban
Termohon;**

**Mendengar
Keterangan
Pihak
Terkait;**

**Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan
lainnya;**

**Pemeriksaan
saksi/ahli;
dan**

**Pemeriksaan
dan/atau
pengesahan alat
bukti.**

17 Juni 2019 s.d.
21 Juni 2019
(Pilpres)

15 Juli s.d. 30 Juli
2019 (Pileg)



I. TAHAPAN RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

Pembahasan perkara

Pengambilan putusan

Drafting putusan

Pilpres:
24 Juni s.d. 27 Juni 2019

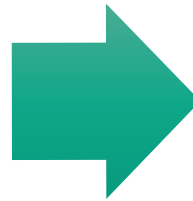
Pileg:
31 Juli s.d. 5 Agustus 2019



J. PENGUCAPAN PUTUSAN DALAM SIDANG PLENO

**Pengucapan Putusan
Perkara Perselisihan
Hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden**

- Pilpres
- 28 Juni 2019

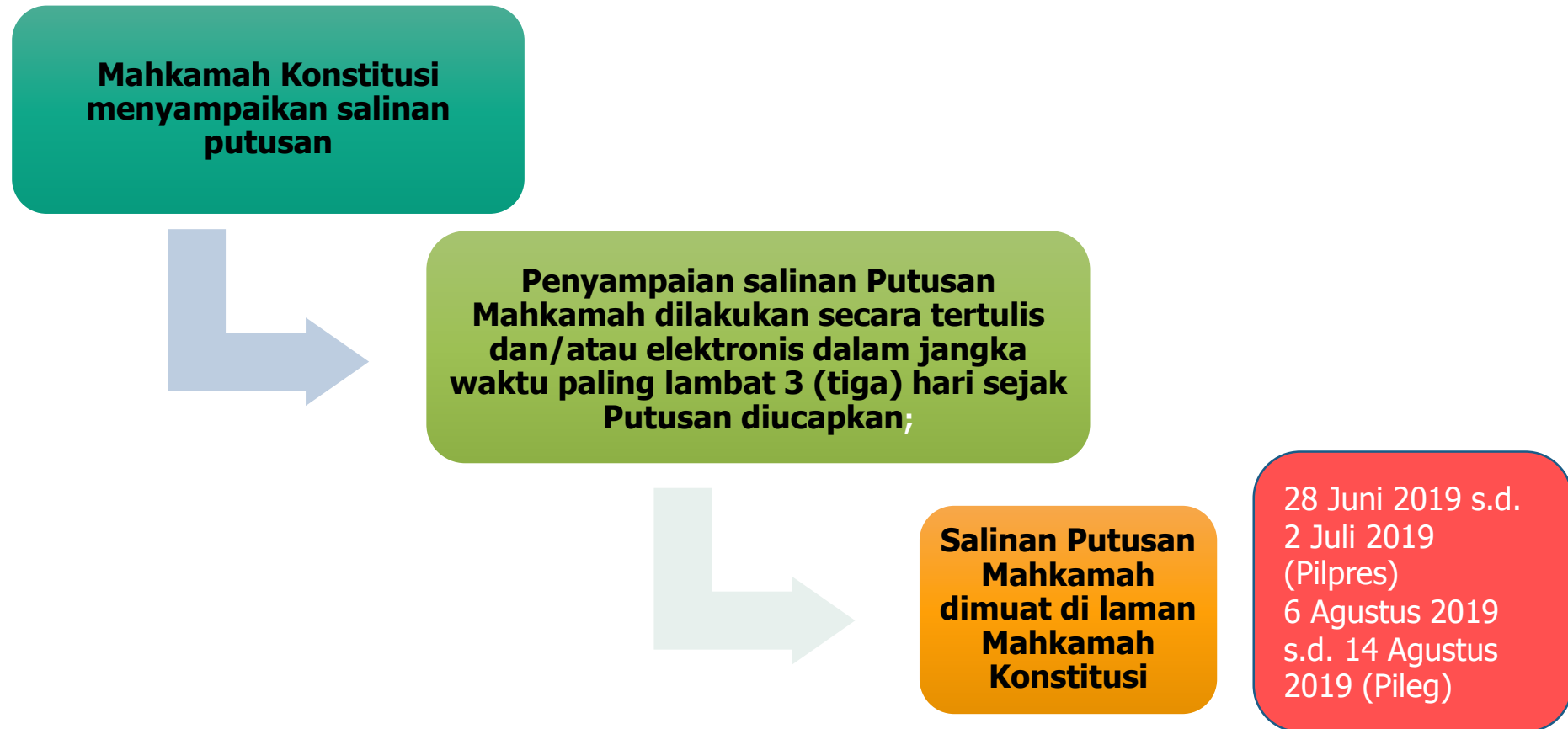


**Pengucapan Putusan
Perkara Perselisihan
Hasil Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD**

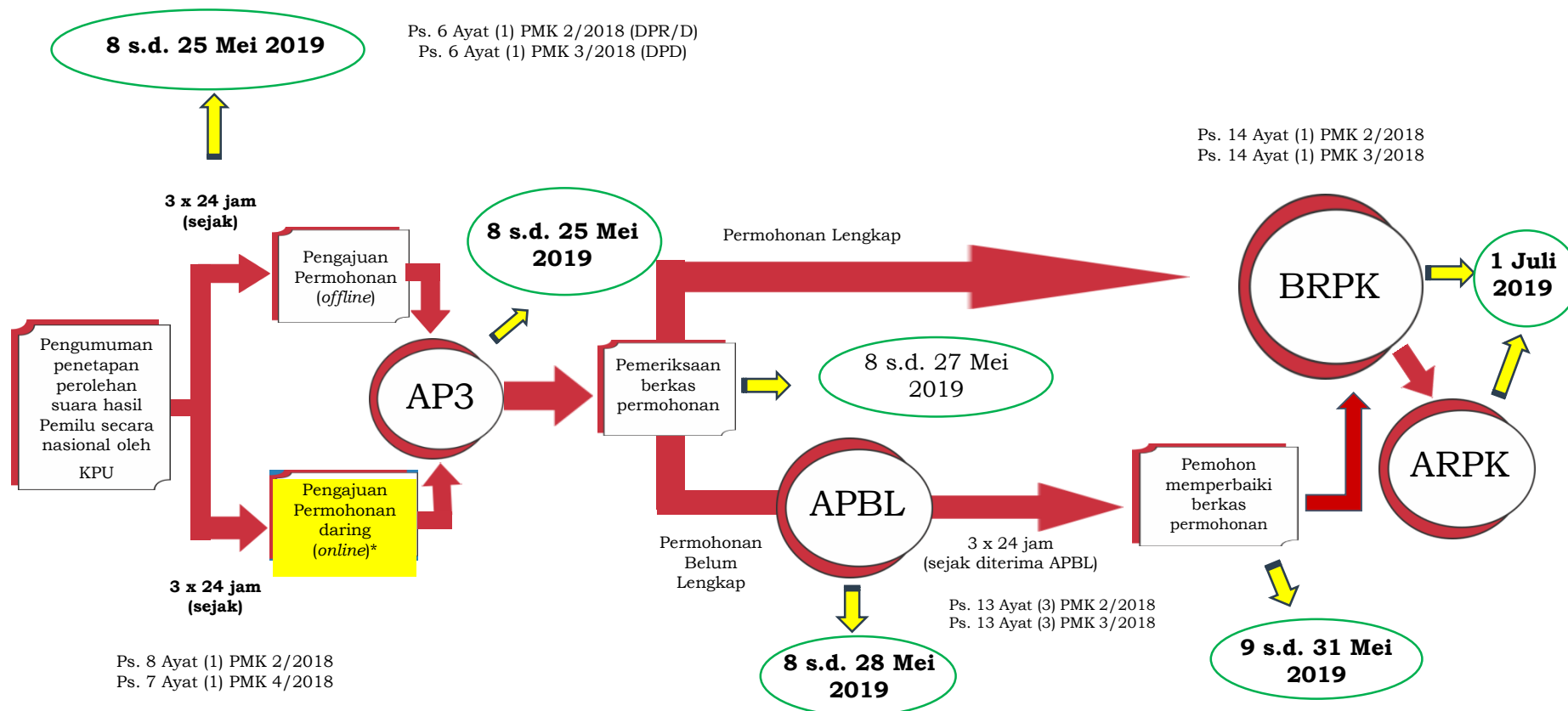
- Pileg
- 6 s.d. 9 Agustus 2019



K. TAHAPAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DAN/ATAU PEMUATAN DALAM LAMAN (WEBSITE)



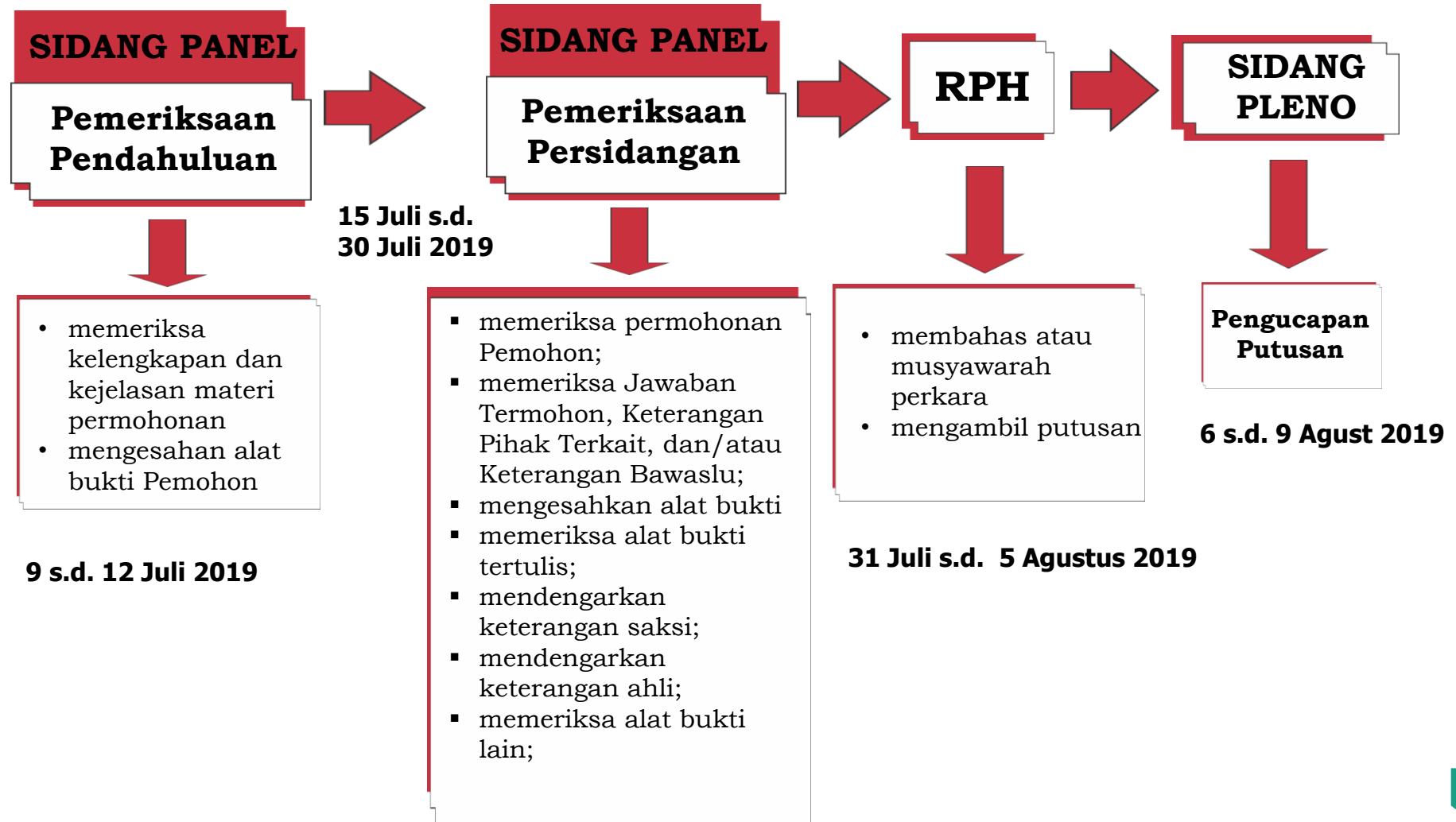
TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan



TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU CALON ANGGOTA DPR, DPRD, DPD

8 Mei s.d. 25 Mei 2019

- **Pengajuan Permohonan Pemohon**

8 Mei s.d. 27 Mei 2019

- **Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon**

9 Mei s.d. 31 Mei 2019

- **Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon**

1 Juli 2019

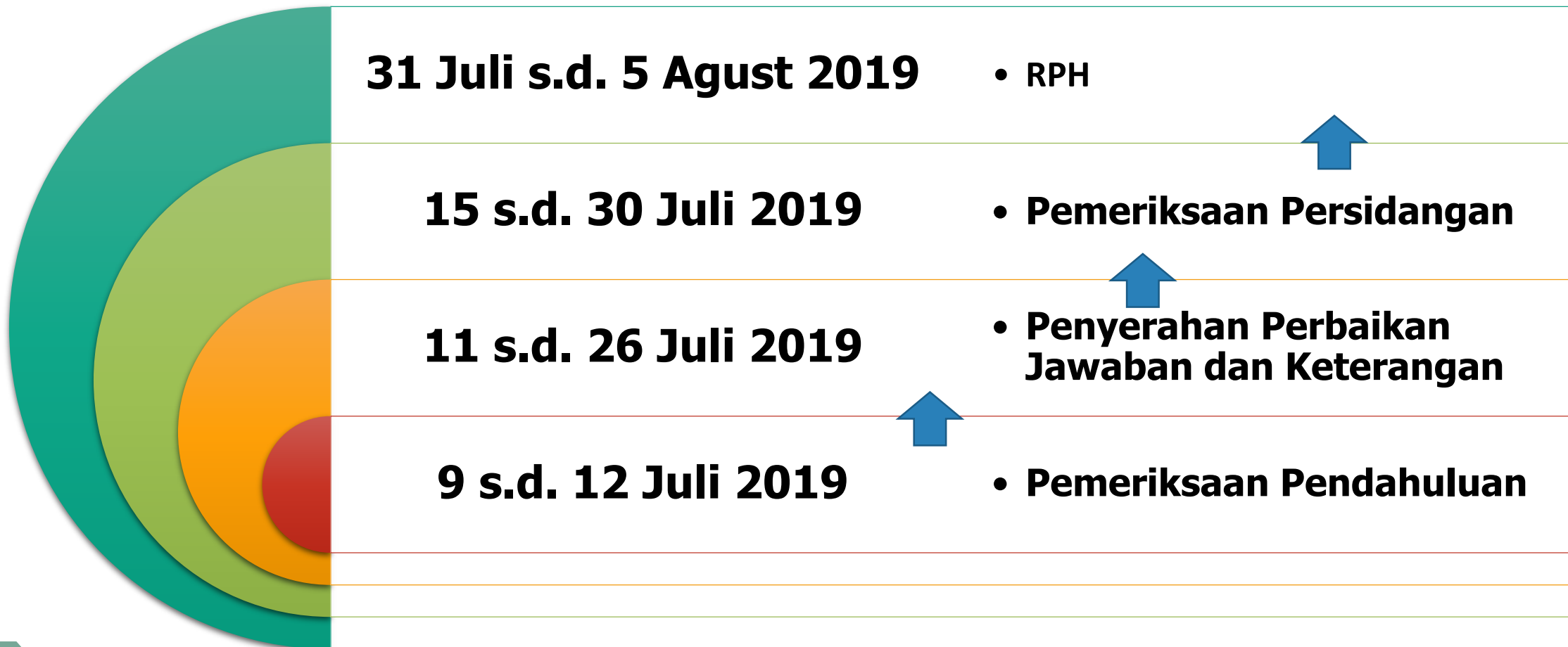
- **Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK**



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



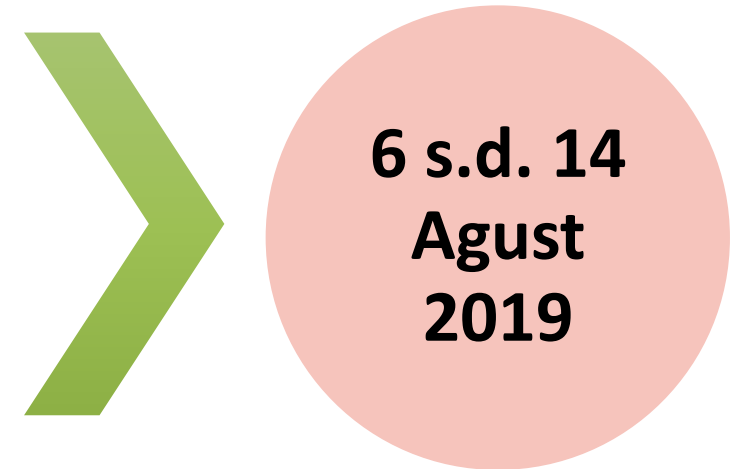
TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU CALON ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



**Pengucapan
Putusan PHPU
anggota DPR, DPD,
dan DPRD**

6 s.d. 14 Agust
2019

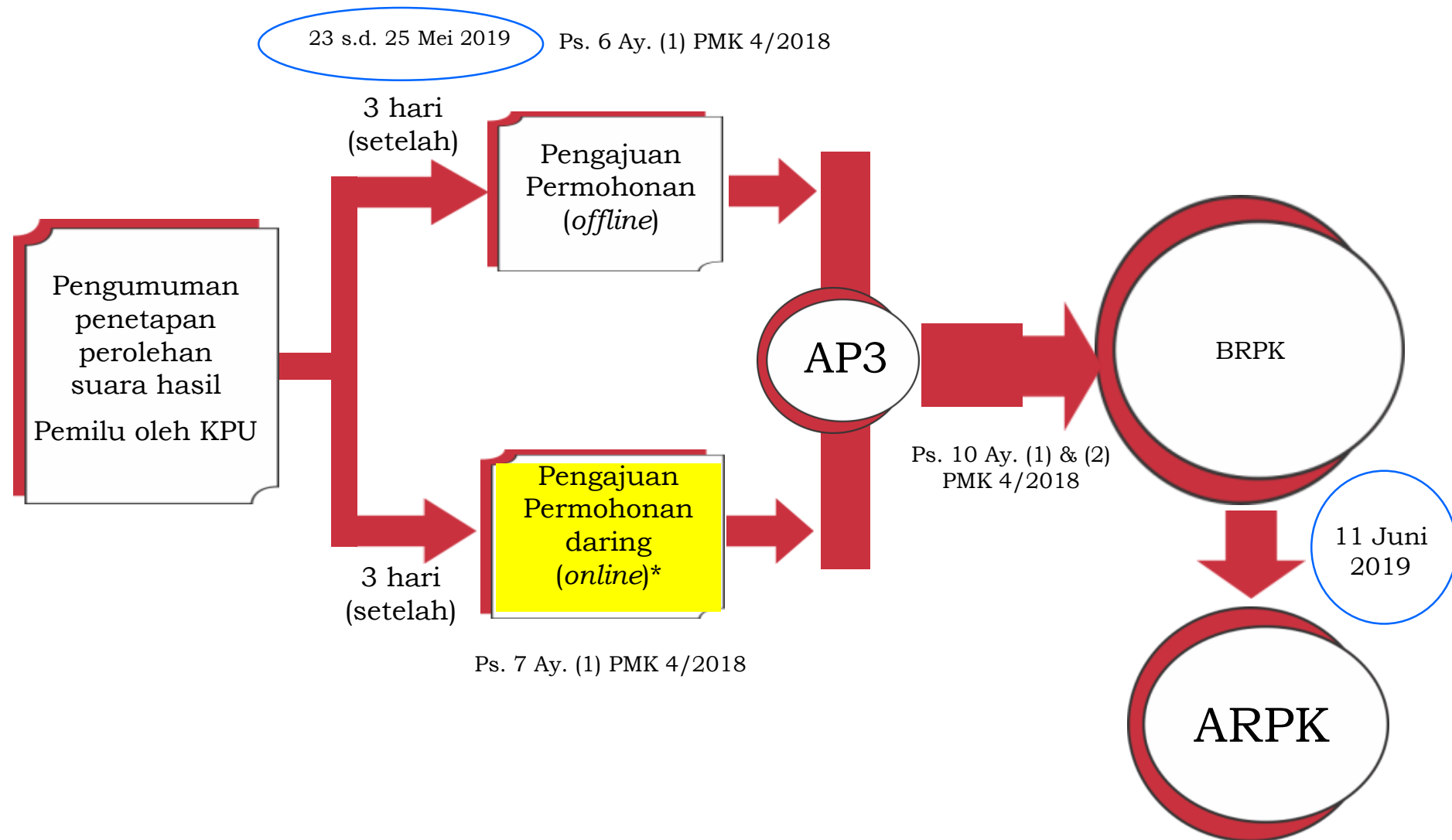
**Penyampaian
salinan Putusan**



**Pemuatan Putusan
dalam laman
(*website*)**



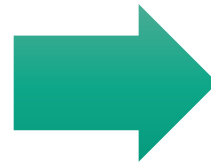
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PILPRES



TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

23 Mei 2019 s.d.
25 Mei 2019

- **Pengajuan Permohonan Pemohon**



11 Juni 2019

- **Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK**

* hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019



TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA PHPU PILPRES)



TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

28 Juni 2019

- **Pengucapan Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden**

28 Juni s.d.
30 Juni 2019

- **Penyampaian Salinan Putusan**

28 Juni s.d.
30 Juni 2019

- **Pemuatan Putusan dalam laman (*website*)**



-TERIMA KASIH-

